



Tinjauan Deskriptif Kasus Papua Merdeka dengan Pendekatan Damai Berdasarkan Sudut Pandang Feyerabend

Euis Susih^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Mutiara 5 Lembang, Indonesia

¹ susiheuis@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 Maret 2021;

Revised: 25 Maret 2021;

Accepted: 28 Maret 2021.

Kata-kata kunci:

Tinjauan Deskriptif;

Studi Kasus;

Papua;

Pendekatan Damai.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kronologi kasus dari Konflik Papua Merdeka dari sudut pandang Paul Feyerabend. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu tentang konflik Papua Merdeka yang dianalisis dengan pembacaan pada kronologi kejadian dan deskripsi dari kasus. Penelitian ini berdasarkan kajian literatur terdahulu serta berupaya mengkaji mengenai analisis pemikiran. Ada keterkaitan antara studi kasus mengenai Konflik Papua Merdeka dengan pemikiran seorang Paul Feyerabend, yaitu dimana pemerintah Indonesia di ibaratkan sebagai metode dan ilmu pengetahuan yang kaku dan baku, sedangkan yang masyarakat Papua khususnya kelompok separatis diibaratkan sebagai Paul Feyerabend yang menantang dan mengkritik dengan pemikiran anarkisme epistemologi dan anything goes terhadap ke kakuan dan kebakuan ilmu pengetahuan dan metodenya yang diibaratkan sebagai pemerintah Indonesia. Saran penelitian bahwa bila masih berlanjutnya konflik Papua Merdeka di Indonesia, diharapkan agar bisa cepat terselesaikan dengan adanya kebijakan pemerintah terutama pendekatan damai.

Keywords:

Descriptive Review;

Case Studies;

Papua;

Peaceful Approach..

ABSTRACT

Descriptive Review of The Case of Free Papua with a Peaceful Approach Based on Feyerabend's Point of View. The purpose of this study is to describe the case chronology of the Papua Merdeka Conflict from the point of view of Paul Feyerabend. Research used in this study using qualitative methods with a case study approach. Case studies are about the Free Papua conflict which is analyzed with readings on the chronology of events and descriptions of cases. This research is based on previous literature studies and seeks to study the analysis of thought. There is a connection between the case study of the Free Papua Conflict and the thinking of a thinker Paul Karl Feyerabend, which is where the Indonesian government is likened to a rigid and standard method and science, while the Papuan, especially separatist groups, are likened to Paul Feyerabend who challenges and criticizes with the anarchism of epistemology and anything goes to rigidity and standards of science and methods that are likened to government of Indonesia. Research advice that if the papua merdeka conflict continues in Indonesia, it is expected that it can be quickly resolved with government policies, especially peaceful approaches.

Copyright © 2021 (Euis Susih). All Right Reserved

How to Cite : Susih, E. (2021). Tinjauan Deskriptif Kasus Papua Merdeka dengan Pendekatan Damai Berdasarkan Sudut Pandang Feyerabend. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(2), 48–53. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/446>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Manusia tinggal di bumi dengan berbagai keberagaman yang ada, seperti keberagaman ras, suku, budaya, agama, yang ada dalam suatu negara (Nurcahyono, 2018; Agung, 2017). Setiap dari masyarakatnya ingin memiliki dan mendapatkan yang terbaik untuk ras, suku, agama, ataupun negaranya. Adanya keberagaman tersebut membuat setiap masyarakat harus dan mengetahui bagaimana cara menghormati serta menghargai setiap perbedaan yang ada di dunia ini, mereka akan selalu menghargai keberagaman tersebut agar tidak adanya konflik diantara sesama masyarakat. Namun, terkadang terdapat peristiwa atau konflik-konflik yang terjadi akibat singgungan yang tak terduga atau dikarenakan masalah keberagaman, politik, ekonomi, sosial. Semua hal tersebut dapat menyebabkan konflik terjadi (Sutardi, 2007).

Salah satunya adalah Konflik Papua Merdeka, dimana muncul OPM yaitu Organisasi Papua merdeka yang mewakili masyarakat papua yang pada saat itu menginginkan keluar dari negara Indonesia dan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Keinginan tersebut muncul karena masyarakat papua merasa kurang dipedulikan dan diperhatikan oleh negara. Namun, sisi lain pemerintah negara Indonesia tidak ingin melepaskan papua dari kenegaraan Indonesia. Akibatnya muncullah konflik antara pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka. Permasalahan tersebut, nantinya akan dibahas hubungan atau keterkaitan antara Konflik Papua Merdeka dengan pemikiran anarkisme epistemologi yang cetuskan oleh Paul Feyerabend.

Rumusan masalah penelitian adalah, pertama bagaimana kronologi kejadian pada Konflik Papua Merdeka? Kedua, bagaimana Konflik Papua Merdeka di bahas menggunakan sudut pandang Paul Feyerabend ? Apakah ada keterkaitan antara konflik tersebut dengan pemikiran Paul Feyerabend? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kronologi kejadian yang terjadi pada Konflik Papua Merdeka. Selain itu, upaya untuk mengetahui sudut pandang Paul Feyerabend dalam membahas Konflik Papua Merdeka.

Penelitian ini memuat beberapa artikel ilmiah di jurnal yang menjadi dasar atau acuan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan, yaitu: pertama, jurnal mengenai pemikiran Paul Feyerabend dan kedua, jurnal mengenai Konflik Papua Merdeka. Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah kefokusannya tentang masalah Konflik Papua Merdeka menggunakan sudut pandang atau perspektif Paul Feyerabend sebagai salah satu dari banyaknya pemikir, sehingga penelitian ini berbeda dengan jurnal, buku ataupun sumber-sumber lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Hipotesis penelitian yaitu adanya keterkaitan antara Konflik Papua Merdeka yang disebabkan masalah ekonomi, sosial dan politik yang berkelanjutan dengan pemikiran anarkisme epistemologi dari seorang tokoh filsuf bernama Paul Feyerabend. Paul Karl Feyerabend merupakan seorang filosof yang lahir pada 13 Januari 1924 di Wina, ia merupakan murid dari seorang pemikir bernama Karl Popper. Selain itu, Paul Karl Feyerabend terkenal karena pemikirannya mengenai anarkisme epistemologi, yaitu pemikiran yang beranggapan bahwa sains seharusnya tidak memiliki aturan atau disebut juga dengan *anything goes*.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif (Arikunto, 2010). Penelitian ini berdasarkan kajian literatur terdahulu serta berupaya mengkaji mengenai analisis pemikiran. Analisis penelitian ini menggunakan pembacaan deskriptif terhadap studi kasus, lalu menggunakan sudut pandang pemikiran. Pembacaan deskriptif menggunakan rujukan dari buku, dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal yang ada baik secara online maupun yang ada secara cetak.

Hasil dan Pembahasan

Poin pertama hasil penelitian mendeskripsikan kronologi konflik di Papua. Konflik Papua Merdeka diawali pada masa kemerdekaan Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945, disaat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, disitulah dimulainya perlawanan diplomatik dan militer yang dilakukan Indonesia kepada belanda, salah satu perlawanan tersebut adalah pengakuan seluruh wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia termasuk wilayah Papua. Namun, pengakuan tanah Papua sebagai wilayah Indonesia dibantah oleh Belanda dan belanda menganggap bahwa tanah Papua merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, Pada tahun 1949 dalam Konferensi Meja Bundar, Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan terkait status kepemilikan wilayah papua, namun perundingan tersebut tidak membuahkan hasil apapun sehingga kedua negara memutuskan untuk melanjutkan pembahasan tersebut setahun kedepan.

Kemudian pada Desember 1950, status kepemilikan papua kembali dibicarakan melalui forum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan PBB memutuskan bahwa Papua berhak untuk menyatakan kemerdekaannya, namun hal tersebut tidak diterima oleh Indonesia maupun Belanda. Setelah perundingan tersebut Indonesia terus mengklaim kepemilikan terhadap wilayah Papua, sehingga Belanda mengajukan perundingan kembali kepada mahkamah internasional, namun undangan tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Setelah perundingan tidak dapat menyelesaikan masalah, pihak Indonesia terus melakukan serangan kepada belanda demi merubut tanah Papua, khawatir akan jatuhnya Papua ke tangan belanda, akhirnya Belanda memutuskan untuk melakukan persiapan kemerdekaan terhadap Papua Barat.

Pada tahun 1961, Belanda pun membentuk akademi Angkatan laut dan tentara Papua sebagai salah satu upaya untuk mempercepat terlaksananya kemerdekaan Papua Barat. Lalu, pada 1 Desember 1961 Belanda berhasil mendeklarasikan kemerdekaan negara Papua di Holladia (saat ini berganti nama menjadi Jayapura) melalui KNP yang dibentuk oleh Belanda itu sendiri. Papua diberikan nama negara "West Papua", lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", lambang negara "Burung Ambruk", bendera negara "Bintang Kejora" dan semboyan negara "One Man One Soul". Sebagai respon dari apa yang telah dilakukan Belanda, Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh presiden Soekarno mengumumkan Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikora merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap Belanda dengan menyerang pasukan Belanda yang ada di Papua Barat, selain itu Presiden Soekarno juga bekerja sama dengan Uni Soviet untuk memperbanyak perbekalan senjata. Hal tersebut membuat Belanda ketakutan dan akhirnya menyerahkan kembali permasalahan tanah Papua kepada PBB, dengan penyerahan tersebut akhirnya Belanda melepaskan Papua dan PBB menyerahkan Papua kepada Indonesia dengan syarat memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk bersuara dan menentukan pilihannya lewat Penentuan Pendapat Rakyat (PERPERA).

Dengan PERPERA, rakyat dapat memilih untuk merdeka dan membentuk negara sendiri atau memilih untuk menjadi bagian dalam negara Indonesia, dalam pelaksanaannya diutus 1000 orang rakyat Papua sebagai perwakilan dari keseluruhan rakyat Papua, pelaksanaan dilakukan dengan sistem One Man One Vote, namun dalam pelaksanaannya terdapat kecurangan dan mendapatkan banyak protes karena ketika pelaksanaan berlangsung terdapat intimidasi dan ancaman yang dilakukan serta keputusan yang dibuat tidak menghadirkan dan melibatkan masyarakat Papua itu sendiri. Mulai dari sinilah munculnya banyak keluhan-keluhan mengenai kejelasan integrasi Papua kepada Indonesia.

Hal tersebut juga muncul Organisasi Papua Merdeka (OPM), yakni sebuah Gerakan atau organisasi bersenjata di Papua bergerak mulai dari tahun 1967 hingga 2001, OPM sering menimbulkan konflik akibat ketidakpuasan terhadap keputusan bahwa Papua terintegrasi dengan Indonesia dan adanya intimidasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Keberadaan OPM yang terus menimbulkan konflik telah mengganggu kedaulatan Indonesia dan pemerintah pun pada tahun 1999 menetapkan Papua sebagai Daerah Otonom Khusus (Otsus), namun dalam pelaksanaannya Otsus tidak berjalan dengan baik, tidak ada perubahan pemerintahan dan pembangunan yang signifikan, hal tersebut membuat masyarakat

Papua kecewa akan program pemerintah tersebut. Kemudian, demi meredam permasalahan Papua, pemerintah Indonesia mengadakan dialog damai dengan masyarakat Papua baik secara internal maupun eksternal (Kaisupy, & Maing, 2021; Marit, & Warami, 2018).

Namun, hingga kini masalah ini belum juga dapat terselesaikan. Ada beberapa indikator yang menandakan bahwa belum terselesaikannya masalah konflik Papua diantaranya adalah Masih terjadinya baku tembak antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tanah Papua, Masih aktifnya perlawanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pemerintah Indonesia, Masih adanya pengimbaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Papua meskipun hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia, Masih adanya tuntutan Referendum yang dilakukan oleh masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia. Adanya rakyat Papua yang melakukan perayaan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Akibatnya, tidak adanya sikap saling percaya melainkan sikap saling mencurigai antara pemerintah Indonesia dan juga rakyat Papua. Selain itu, masih adanya operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas perintah pemerintah Indonesia di wilayah Papua (Sari, 2021).

Selain indikator yang telah disebutkan, terdapat juga beberapa sebab yang membuat belum terselesaikannya masalah Konflik Papua merdeka, diantaranya adalah Ketidakpuasaan terhadap Status Papua saat ini yang terintegrasi ke Indonesia, Gagalnya kebijakan dan program pembangunan pemerintah Indonesia, adanya kekerasan dan ketidakpercayaan aparat keamanan kepada masyarakat Papua, Makin banyaknya masyarakat Papua yang tersingkirkan dari wilayahnya sendiri dan digantikan oleh banyaknya pendatang yang masuk ke Papua, Adanya kepentingan elit negara di tanah Papua yang menyebabkan banyak rakyat Papua yang kehilangan wilayah, tanah serta sumber daya mereka. Meskipun masih banyaknya indikator yang menandakan belum selesainya masalah mengenai Konflik Papua merdeka serta masih terdapatnya faktor yang menyebabkan konflik tersebut belum terselesaikan, namun upaya-upaya terus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua ini, dan Papua bisa menjadi bagian negara Indonesia yang berdaulat (Lenggono, 2021).

Poin pembahasan kedua, pemikiran Paul Feyerabend. Paul Karl Feyerabend merupakan seorang filosof yang lahir pada 13 Januari 1924 di Wina, Austria. Paul Feyerabend merupakan orang yang sangat menyukai bidang kesenian, oleh karena itu banyak contoh penjebaran ilmiah dalam karyanya menggunakan bidang seni. Setelah ia mendapatkan gelar doktornya di Wina Austria, ia pergi ke London berguru kepada Karl Popper dan mendukung pemikiran falsifikasionisme yang di kemukakan oleh Karl Popper. Namun, setahun kemudian, setelah terjadinya pertemuan antara Imre Lakatos dengan Paul Feyerabend, pemikiran Paul Feyerabend berubah drastis, ia menentang pemikiran Karl Popper yang dulu ia dukung, selain itu ia juga berpendapat bahwa terdapat pelanggaran pada pokok-pokok prinsip mekanika kuantum, oleh karena itu Paul Feyerabend berpendapat bahwa segala usaha pencarian hukum universal hanya ilusi belaka (Priyatna, 2019; Shofiyuddin, 2015).

Pemikiran Paul Feyerabend sendiri termasuk kedalam Paradigma radikal dan anarkis, oleh karena itu seluruh pemikiran Paul Feyerabend disebut dengan anarkisme epistemologi. Anarkisme epistemologi merupakan teori epistemologi yang memiliki anggapan bahwa aturan metodologi yang khusus mengatur perkembangan ilmu pengetahuan dan sains sesungguhnya tidak ada, karena seharusnya sains dapat dikembangkan secara bebas dan universal tanpa harus di batasi oleh sains itu sendiri. Hasil dari adanya pandangan Paul Feyerabend tersebut adalah munculnya sebuah pemikiran atau paradigma anything goes (apa saja boleh) dalam metodologi, alasan Paul Feyerabend berpendapat anything goes adalah karena ia berpendapat bahwa tidak ada metodologi yang tetap, oleh karena itu sains harus diberikan kebebasan sebebaskan mungkin (Mohamad, 2021).

Ada dua hal yang menjadi kritik Paul Feyerabend dari adanya pendapat dan paradigma yang ia kemukakan. Dua hal tersebut adalah Anti Metode dan Anti Ilmu Pengetahuan. Anti Metode adalah merupakan kritik Paul Feyerabend terhadap baku dan universalnya metode dalam ilmu pengetahuan yang telah disepakati oleh seluruh ilmuan dan yang mendasari segala fakta dan penelitian yang ada.

Selain itu, hal yang memperkuat kritiknya adalah bahwa sebenarnya para ilmuwan Galileo, Kepler, Newton tidak menggunakan satu metode tertentu yang sama melainkan menggunakan metode yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu menurut Paul Feyerabend satu satunya cara untuk tidak menghambat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan adalah dengan cara memberikan kebebasan ilmu pengetahuan menggunakan berbagai metode dan tidak dibatasi metode tertentu saja (Zamzami, 2012).

Anti ilmu pengetahuan adalah sebuah kritik yang dilakukan oleh Paul Feyerabend dengan dalih kebebasan individu, kritik tersebut berisi ke-antian Paul Feyerabend terhadap ilmu pengetahuan yang telah melewati kewenangannya, dalam hal ini ilmu pengetahuan diklaim baku bahwa ilmu pengetahuan lebih unggul dibandingkan ilmu apapun. Selain itu, hal yang memperkuat kritiknya adalah banyaknya ilmuwan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kekuasaan seperti pengaturan dalam sistem pendidikan. Meskipun begitu, pandangan Paul Feyerabend yang mengatasnamakan kebebasan memberikan dampak negatif dalam kenyataannya, seperti penelitian dan produksi senjata pembunuh massal, bom atom, nuklir, dan senjata lain yang merugikan banyak orang (Widarda, 2019).

Poin pembahasan ketiga yaitu hubungan antara konflik dan pandangan Feyerabend. Permasalahan mengenai Konflik Papua merdeka apabila dikaitkan dengan pemikiran filosof Paul Feyerabend atau di bahas dengan menggunakan pemikiran Paul Feyerabend akan terdapat hubungan antara keduanya. Dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia diibaratkan sebagai pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dan metodologi pengetahuan yang baku, universal, tetap, fakta yang tidak bisa diubah dan tidak bebas, sama halnya seperti pengetahuan dan metodologi pengetahuan, pemerintahan Indonesia yang merupakan sistem yang tidak bebas, memiliki aturan, tetap, dan sebagainya (Mukhtadi, 2021).

Di lain sisi, Kelompok Separatis seperti Organisasi Papua Merdeka diibaratkan seperti Paul Feyerabend yang menentang semua hal tersebut, dalam hal ini pemikiran anything goes dan anarkisme epistemologi di gunakan oleh OPM, dimana mereka melakukan segala cara, dan bukan hanya satu cara saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada intinya Pemerintah Indonesia diibaratkan seperti pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kemudian di kritik oleh Paul Feyerabend karena kekakuannya, sedangkan kelompok Separatis seperti OPM diibaratkan Paul Feyerabend yang mengkritik kekakuan dan kekakuan ilmu pengetahuan yang diibaratkan sebagai pemerintah Indonesia.

Simpulan

Ada keterkaitan antara studi kasus mengenai Konflik Papua Merdeka dengan pemikiran seorang Filosof Paul Karl Feyerabend, yaitu dimana pemerintah Indonesia di ibaratkan sebagai metode dan ilmu pengetahuan yang kaku dan baku, sedangkan yang masyarakat Papua khususnya kelompok separatis diibaratkan sebagai Paul Feyerabend yang menantang dan mengkritik dengan pemikiran anarkisme epistemologi dan anything goes terhadap ke kakuan dan ke baku an ilmu pengetahuan dan metodenya yang diibaratkan sebagai pemerintah Indonesia. Saran penelitian bahwa masih berlanjutnya Kasus Konflik Papua Merdeka di Indonesia, diharapkan agar bisa cepat terselesaikan, dengan pendekatan dan kebijakan pemerintah yang damai. Selain itu, diharapkan juga muncul penelitian ataupun jurnal baru yang bisa membahas lebih dalam lagi mengenai Konflik Papua Merdeka yang dibahas menggunakan perspektif atau pemikiran baik Paul Feyerabend maupun tokoh-tokoh yang lain.

Referensi

- Agung, D. A. G. (2017). Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila). *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 11(2), 151-159.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 82-98.
- Lenggono, P. S. (2021). Sodality in the Perspective of Pancasila: A Pathway to Indonesian Sociology. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 66-95.

- Mambraku, N. S. (2016). Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik. *Kajian*, 20(2), 75-85.
- Marit, E. L., & Warami, H. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1).
- Mohamad, G. (2021). Polemik Sains. IRCISOD.
- Mukhtadi, M. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia (Government Strategies In Managing Papua Separatist Movement And Its Implications On Defense Diplomacy). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(2).
- Nurchayono, O. H. (2018). Pendidikan multikultural di Indonesia: Analisis sinkronis dan diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 105-115.
- Priyatna, M. (2019). Telaah Kritis Konsep Ide Besar (Fritjof Capra), Anything Goes (Paul Feyerabend), Dan Krisis Sains Modern (Richard Tarnas), Dalam Upaya Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 125-142.
- Sari, N. A. (2021). Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Anggota Tni-Ad Yang Melaksanakan Tugas Di Wilayah Rawan Konflik (Papua) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.).
- Shofiyuddin, M. (2015). Anarki Epistemologis Paul Karl Feyerabend dan Relevansinya Pada Epistemologi Tafsir Al-Quran. *dalam Hermeneutika*, 9(1).
- Sutardi, T. (2007). Antropologi: Mengungkap keragaman budaya. PT Grafindo Media Pratama.
- Tahir, M. (2016). Kontribusi Pemikiran Epistemologis Paul K. Feyerabend Terhadap Studi Islam. *LENTERA*, 18(2).
- Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. *Limen*, 12(2, April), 82-106.
- Widarda, D. (2019). Demokrasi Sosial dalam Pemikiran Paul Feyerabend. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(2), 184-203.
- Zamzami, M. (2012). Teologi Humanis Jamâl al-Bannâ: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Studi Keislaman. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1), 174-200.